

Pengaruh Program Dana Desa Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Dan Pemerataan Pendapatan di Kalimantan Tengah

Effect of Village Fund Programs on Employment Opportunities, Economic Growth, Poverty Levels, and Equitable Income in Central Kalimantan

Udi KUSDINO¹, Gundik Gohong², Fitria Husnataria³

¹Student of the Master of Economics in Palangka Raya University

^{2&3}Department of Economics, Economics and Business Faculty, University of Palangka Raya

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh program dana desa terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pemerataan pendapatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan regresi data panel. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang menerima dana desa di Kalimantan Tengah pada tahun 2015-2017, sedangkan objek penelitian adalah pengaruh program dana desa terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pemerataan pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penentuan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu memperoleh data Pagu Dana Desa, data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), data angka tingkat kemiskinan, data pertumbuhan ekonomi/PDRB, dan data rasio Gini pada 13 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah periode tahun 2015-2017. Data diolah dengan bantuan *software SPSS versi 24*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara untuk program desa tidak berpengaruh terhadap pemerataan pendapatan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kata kunci: *dana desa, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pemerataan pendapatan*

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out and analyze the influence of village fund programs on employment opportunities, economic growth, poverty levels and income distribution. This study uses a qualitative method with a panel data regression approach. The subjects in this study were all districts that received village funds in Central Kalimantan in 2015-2017, while the object of the study was the influence of village fund programs on employment opportunities, economic growth, poverty levels and even income distribution of the people of Central Kalimantan Province. The method of determining the sample used is purposive sampling. Data collection techniques used in this study are documentation techniques, namely obtaining village fund ceiling data, data on labor force participation rates, poverty rate data, economic growth / GRDP data, and gini ratio data in 13 districts in Central Kalimantan Province for the period of the year 2015-2017. Data was processed with the help of SPSS version 24 software. The results showed that village fund programs had a positive and significant effect on employment

opportunities, economic growth and poverty levels in Central Kalimantan Province. While for village programs it does not affect the distribution of income in Central Kalimantan Province.

Keywords: *village funds, employment opportunities, economic growth, poverty levels, and income distribution*

1. PENDAHULUAN

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pembangunan desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan semata, melainkan ditempatkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa.

Selain diperkuat kewenangannya, desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014, dimana pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Salah satu kebijakan yang mengiringi penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah kebijakan Dana Desa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari Dana Desa pada dasarnya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lebih pemerataan pendapatan (Chasanah, 2017:14).

Sejalan dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, pemerintah melalui kebijakan pengalokasian dana desa pada APBN 2015-2017, menyalurkan dana kepada setiap desa secara merata berdasarkan parameter jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Dana Desa yang setiap tahun mengalami peningkatan secara Nasional, Rp. 20 Triliun (2015), Rp. 47 Triliun (2016), dan Rp. 60 Triliun (2017). Dalam roadmap Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, diperkirakan jumlah dana yang akan dikelola oleh pemerintah desa pada

tahun 2017 adalah Rp. 128 triliun dan terus meningkat menjadi Rp. 178,5 Triliun di tahun 2019 (Bappenas, 2017).

Namun demikian implikasi dari pengalokasian Dana Desa belum sepenuhnya mencerminkan keadilan dan keberpihakan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, dan belum sepenuhnya berfokus kepada upaya pengentasan kemiskinan (Kemenkeu, 2017:15). Prioritas penggunaan Dana Desa mestinya diupayakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan.

Menurut United Nations (1961) dalam uraian Esmara (1986:289), “kesempatan kerja” merupakan salah satu komponen kebutuhan dasar. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*), ini dipopularkan oleh *International Labor Organisation* (1976) dengan menggunakan indikator kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Thee Kian Wie, 1981:29). Sementara itu Badan Pusat Statistik menggunakan konsep Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang memberikan gambaran tentang perbandingan jumlah penduduk yang aktif

secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari, perbandingan jumlah penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja, dan menggambarkan presentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam angkatan kerja (BPS Kalimantan Tengah, 2013:46)

Dalam berbagai kerangka teoritis maupun fakta empiris telah banyak dibuktikan bahwa faktor tenaga kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembangunan. Mengingat penting dan kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan dalam suatu proses pembangunan sebagai salah satu penyebab terjadinya kemiskinan, maka variabel ini perlu dianalisis terutama menyangkut isu pengangguran. Pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal adalah masalah pokok makro ekonomi yang paling utama (BPS Kalimantan Tengah, 2013:108).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa “Tenaga Kerja adalah seluruh penduduk dalam usia kerja yang berumur minimal 15 tahun atau lebih yang berpotensi dapat memproduksi barang atau jasa” (Harahap dan Bachtiar, 2017). Menurut Sumarsono (2009) menyatakan bahwa pasar tenaga kerja merupakan sebuah mekanisme atau aktivitas yang bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja.

Pasar tenaga kerja dibentuk oleh dua kekuatan utama yaitu permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama di dalam proses produksi barang dan jasa. Permintaan tenaga kerja terjadi pada pasar input, dimana struktur pasar input ini memiliki pasar persaingan sempurna atau tidak sempurna. Hal ini akan memengaruhi tingkat kesempatan kerja dan tingkat upah pasar (Santoso, 2012).

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta aktif

dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja atau disebut pekerja (Nainggolan, 2009).

Menurut Nainggolan (2009), beberapa konsep ketenagakerjaan yang berlaku secara umum yaitu:

- 1) Tenaga kerja atau penduduk usia kerja, adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
- 2) Angkatan kerja, adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat atau berusaha unntuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa. Sehingga yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya selama seminggu yang lalu bekerja (K) dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan (MP). Angkatan kerja dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$AK = K + MP$$

Penjumlahan angka-angka angkatan kerja dalam bahasa ekonomi disebut sebagai penawaran angkatan kerja (*labour supply*). Sedangkan penduduk yang berstatus sebagai tenaga kerja termasuk kedalam sisi permintaan (*labour demand*).

3) Bukan angkatan kerja, adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Namun kegiatan utama selama seminggu yang lalu adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Apabila seseorang yang sekolah, mereka bekerja minimal 1 jam selama seminggu yang lalu, tetapi kegiatan utamanya adalah sekolah. Sehingga individu tersebut tetap termasuk kedalam kelompok bukan angkatan kerja. Mereka yang tercatat lainnya jumlahnya tidak sedikit dan mungkin sebagian besar masuk kedalam transisi antara sekolah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak dalam kategori bukan angkatan kerja (BAK). Jadi jumlah usia kerja (UK) apabila dilihat melalui persamaan identitas adalah sebagai berikut:

$$UK = AK + BAK$$

4) Tingkat partisipasi angkatan kerja, adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok umur sebagai presentase penduduk dalam kelompok umur tersebut. Dimana membandingkan angkatan kerja dengan tenaga kerja. Untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{AK}{UK} \times 100\%$$

5) Tingkat pengangguran, adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja sedang aktif mencari pekerjaan. Dimana membandingkan jumlah orang yang mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran (TP) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPAK = \frac{MP}{AK} \times 100\%$$

Jumlah orang yang bekerja tergantung dari besarnya permintaan (*demand*) dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam masyarakat. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian dan tingkat upah. Besar penempatan (jumlah orang yang bekerja atau tingkat *employment*) dipengaruhi oleh faktor kekuatan penyediaan dan permintaan tersebut, sedangkan besarnya penyediaan dan permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh tingkat upah.

2.2. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Variabel ini sering digunakan untuk mengukur seberapa baik ekonomi suatu

negara sudah dikelola dengan benar. Menurut Mankiw (2007) mengemukakan PDB dapat dipandang dalam 2 hal yaitu (1) Total pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam perekonomian, (2) Total pengeluaran atas produk barang dan jasa dalam ekonomi.

Todaro dan Smith (2003) mengidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu: *Pertama*, akumulasi modal (*capital acumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar *output* dan pendapatan dikemudian hari; *Kedua*, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat mengacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan pasar ukuran domestiknya; *Ketiga*, kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonomi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terpenting. Dalam pengertian yang paling sederhana, kemajuan teknologi terjadi karena ditemukan cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional. Kemajuan

teknologi ini akan menghasilkan metode produksi padat karya yang efisien.

Istilah pembangunan ekonomi biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Dengan perkataan lain, dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi, misalnya kepada usaha merombak sektor pertanian yang tradisional, masalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembagian pendapatan (Sukirno, 2010).

Adapun teori-teori Pertumbuhan Ekonomi yang berkembang antara lain sebagai berikut:

- 1) Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut teori ini pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu: jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menaruh perhatiannya pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 2) Teori pertumbuhan Harrod-Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis). Sementara Harrod-Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). Teori Harrod-Domar didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian bersifat tertutup, hasrat menabung ($MPS=s$) adalah konstan,

proses produksi memiliki koefisien yang tetap, dan tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

- 3) Teori pertumbuhan Neo-Klasik. Teori ini dikembangkan oleh R. M. Solow (1970) dan T. W. Swan (1956). Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan model Harrod-Domar adalah dimasukkannya unsur kemajuan teknologi dalam modelnya. Selain itu, Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian, syarat-syarat adanya pertumbuhan ekonomi yang baik dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara tenaga kerja dan modal. Hal ini berarti ada fleksibilitas dalam rasio modal-output dan rasio modal-tenaga kerja.
- 4) Teori Schumpeter. Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat yang mampu melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun

memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

2.3. Teori Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2017), kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan atau kondisi kurang sejahtera yang dihitung dalam Rp (Rupiah) per kapita per bulan (Case dan Fair, 2010). Kemiskinan adalah suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan minus (*deprivation*) bila dimasukkan dalam konteks tertentu. Hal itu berkaitan dengan minimnya pendapatan dan hara, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan (Mirza, 2012:6). Defenisi luas dari kemiskinan ini adalah “kurangnya kesejahteraan”. Misalnya apabila masyarakat sangat kurang sejahtera, berarti masyarakat miskin (Case & Fair, 2010). Di sisi lain apabila mereka berada dalam kondisi yang sangat sejahtera, maka hidupnya ditandai dengan kemakmuran, kebahagiaan dan kepuasan (Albprnoz dkk, 2007). Kendati keadaan kemiskinan memiliki taraf kehidupan yang rendah dan tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam suatu waktu dan keadaan (Cahyanto, 2012).

Menurut Barika (2013:28) kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi

lima kategori yaitu: 1) Kemiskinan absolut, 2) Kemiskinan relatif, 3) Kemiskinan struktural, 4) Kemiskinan kronis, dan 5) Kemiskinan sementara.

Di lain pihak, sejumlah indikator secara agregat mendefinisikan kemiskinan dari berbagai versi beragam. Secara matematis ukuran kemiskinan dilihat berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak). Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Berikut matematis GK tersebut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Dimana:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

2.4. Teori Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan, dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan antipati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat (Fauzia dan Riyandi, 2014:135).

Distribusi pendapatan pada dasarnya merupakan suatu konsep mengenai penyebaran pendapatan diantara setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Konsep pengukuran distribusi pendapatan dapat ditunjukkan oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat

dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Arsyad (2010) mengemukakan bahwa distribusi pendapatan pada sebuah perekonomian adalah hasil akhir dari seluruh proses ekonomi, yang artinya bahwa distribusi pendapatan pada prinsipnya harus memperhitungkan semua faktor yang memengaruhinya. Ketidakmerataan dalam suatu pembangunan meliputi ketidakmerataan pendapatan nasional, ketidakmerataan pendapatan spasial, dan ketidakmerataan pendapatan regional.

Terdapat beberapa teori mengenai distribusi pendapatan (Arsyad, 2010), diantaranya:

- 1) Teori Kuznetz (hipotesis U terbalik tentang ketidakmerataan). Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan-kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.
- 2) Teori Distribusi Pendapatan Kaldor. Kaldor menyatakan bahwa ada dua

kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok kapitalis dan kelompok buruh. Masing-masing kelompok mempunyai *propensity to save* (s) yang berbeda yaitu s_p untuk kelompok kapitalis dan s_w untuk kelompok buruh, dan dianggap bahwa $s_p > s_w$.

Jadi dalam model Kaldor pola distribusi pendapatan mempunyai frekuensi terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila $s_p > s_w$, maka semakin besar *profit share* semakin tinggi pula lajur pertumbuhan ekonomi. Ini berarti bahwa semakin tidak merata pula distribusi pendapatan semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi. Model kaldor menunjukkan akan adanya “*trade off*” atau pilihan antara pertumbuhan GDP yang cepat, tetapi dengan distribusi pendapatan yang tidak merata atau pertumbuhan GDP yang lambat tetapi dengan yang lebih merata.

Pengukuran distribusi pendapatan pada umumnya menggunakan Kurva Lorenz dan Indeks Gini (Arifianto dan Setiyono, 2013) sebagai berikut:

- 1) Kurva Lorenz. Sumbu vertikal menunjukkan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentase jumlah penduduk. Jumlah ini juga kumulatif sampai 100%. Dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk

bujur sangkar. Sebuah garis diagonal kemudian digambarkan melalui titik origin menuju sudut kanan atas dari bujur sangkar tersebut. Setiap titik pada garis diagonal tersebut menunjukkan bahwa presentase pendapatan yang diterima sama persis dengan presentase penerima pendapatan tersebut. Sebagai contoh, titik tengah dari diagonal tersebut betul-betul menunjukkan bahwa 50% pendapatan diterima oleh 50% jumlah penduduk.

Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna, misalnya keadaan dimana seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, akan ditunjukkan oleh berhimpitnya kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

- 2) Indeks Gini. Secara matematis rumus koefisien Gini adalah Kurva Lorenz memetakan kumulatif pendapatan pada sumbu vertikal dengan kumulatif penduduk pada sumbu horizontal. Koefisien gini diperoleh dengan membagi luas daerah a dengan $(A+B)$. jika setiap individu memiliki pendapatan yang sama, maka kurva distribusi pendapatan akan tepat jatuh pada garis

lurus 45 derajat pada gambar dan koefisien gini bernilai 0. Sebaliknya jika seorang individu menguasai seluruh pendapatan, dikatakan menjadi ketidakmerataan sempurna (maksimum) sehingga kurva distribusi pendapatan akan jatuh pada titik $(0,0)$; $(0,100)$ dan $(100,100)$; dan angka koefisien gini bernilai 1. Koefisien gini dihitung sebagai berikut (Arsyad, 2010):

$$G = \frac{A}{(A+B)} = 1 - 2B$$

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(x) dx$$

(Karena $A+B = 0,5$) atau untuk fungsi probabilitas diskret $f(y)$ dengan y_i , i dan 1 sampai n , adalah titik-titik diurutkan dari kecil ke besar (increasing):

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n f(y_i)(S_i - 1 - S_i)}{S_n}$$

Dimana:

$$S_i = \sum_{i=1}^i f(y_i) y_i \text{ dan } S_0 = 0$$

Pada praktiknya, fungsi $L(x)$ maupun $f(y)$ tidak diketahui, hanya ada titik koordinat dalam interval, sehingga koefisien Gini dihitung menggunakan rumus:

$$S_i = \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1}) (Y_k + Y_{k-1})$$

Dimana:

X_k = kumulatif proporsi populasi

Y_k = kumulatif proporsi pendapatan

Y_k = diurutkan dari kecil ke besar

Koefisien gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya

terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna).

2.5. Konsep Pembangunan Desa

Pengertian dari pembangunan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan desa juga diartikan suatu bentuk pembangunan yang di dalamnya terdapat keikutsertaan yang dilakukan oleh warga obyek pembangunan tersebut. Selain itu pembangunan yang dilakukan tersebut mempunyai sifat menyeluruh. Artinya meliputi segala aspek kehidupan rakyatnya. Tujuan diadakannya pembangunan desa selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat juga sebagai pemanfaatan potensi yang dimiliki baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara optimal (Mardijani, 2010). Adapun model-model pembangunan desa terbagi menjadi tiga (Winarmo, 2003:21), yaitu sebagai berikut:

1) Model intervensi rendah. Model ini disebut juga model produktivitas, yaitu model yang diimplementasikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat tanpa adanya melakukan perubahan-perubahan penting substansial terhadap struktur sosial.

2) Model intervensi menengah. Model ini juga disebut model solidaritas, yaitu model yang bertujuan untuk memperoleh pencapaian dalam perencanaan dan pembangunan desa pada tingkat nasional dan tingkat lokal.

3) Model intervensi tinggi. Model ini juga disebut model pemerataan. Hal ini dikarenakan model ini beranggapan bahwa penyebab utama adanya keterbelakangan desa adalah tidak meratanya pendapatan, kekayaan dan jabatan atau kekuasaan di lingkungan masyarakat.

2.6. Konsep Dana Desa

Menurut UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Dana Desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Lebih lanjut dalam pasal 74 UU Desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah. Sedangkan kebutuhan pembangunan (tidak terbatas pada kebutuhan primer) meliputi: pelayanan

dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun besarnya dana desa yang berasal dari APBN ditentukan 10% dari dana di luar dana transfer daerah secara bertahap, yang dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Penghitungan dana desa setiap desa akan dilakukan sebagai berikut (Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.07/2017):

1) Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:

a. Pagu alokasi dasar, dengan rumus

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 99\% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten/Desa}$$

b. Pagu Bagian Formula, dengan rumus:

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu dana desa kabupaten/kota}$$

2) Menghitung bagian Alokasi Dasar (AD) dana desa setiap desa, dengan rumus:

$$AD = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa di Kab Kota yg bersangkutan}}$$

3) Menghitung bagian alokasi formula dana desa setiap desa dengan urutan sebagai berikut:

a. Rasio jumlah penduduk desa (rasio JP), dengan rumus:

rasio JP

$$= \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk desa yang bersangkutan}}$$

b. Bobot jumlah penduduk desa (bobot JP), dengan rumus:

$$\text{bobot JP} = 25\% \times \text{rasio JP}$$

c. Rasio jumlah penduduk miskin desa (rasio JPM), dengan rumus:

rasio JPM

$$= \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin desa yang bersangkutan}}$$

d. Bobot jumlah penduduk miskin desa (bobot JPM), dengan rumus:

$$\text{bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

e. Rasio luas wilayah desa (rasio LW), dengan rumus:

rasio LW

$$= \frac{\text{luas Wilayah Desa}}{\text{total wilayah desa yang bersangkutan}}$$

f. Bobot luas wilayah desa (bobot LW), dengan rumus:

$$\text{bobot LW} = 10\% \times \text{rasio LW}$$

g. Rasio indeks kesulitan geografis desa (rasio IKG), dengan rumus:

$$\text{rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG desa yang bersangkutan}}$$

h. Bobot indeks kesulitan geografis desa (bobot IKG), dengan Rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

i. Total bobot, dengan rumus:

Total Bobot

$$= \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

j. Bagian alokasi formula, dengan rumus:

Alokasi formula

= total bobot \times pagu bagian formula

4) Menghitung dana desa setiap desa dengan rumus:

Dana desa

= alokasi dasar + alokasi formula

pendapatan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu cara pengambilan sampel didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik ini dilakukan atas beberapa pertimbangan yaitu dengan keterbatasan tenaga, waktu, dan dana.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 115) bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek dalam penelitian ini seluruh kabupaten/kota yang menerima dana desa di Kalimantan Tengah pada tahun 2015-2017, sedangkan objek penelitian adalah pengaruh program dan desa terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.

3.2. Sampel dan Metode Penentuan Sampel

Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada proses penyaringan kelengkapan data tentang program desa, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pemerataan

3.3. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data panel, yaitu gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Data *time series* merupakan data yang berdasarkan pada periode terjadinya, yaitu dari tahun 2015-2017. Kemudian data *cross section* ialah data pada tahun tertentu dengan objek yang berbeda.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik dokumentasi yaitu memperoleh data pagu dana desa, data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), data kemiskinan, data pertumbuhan ekonomi/PDRB, data rasio gini pada 13 kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi

Kalimantan Tengah, Dinas PMD Kabupaten, serta instansi-instansi lain yang terkait. Selain itu penelitian ini juga melalui studi kepustakaan dan mencatat teori-teori dari buku-buku literatur, bacaan-bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3.4. Definisi Operasional Variabel

Variabel Independen (X)

Program dana (X) adalah pelaksanaan dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolanya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Hukum Tua (Kepala Desa). Data diambil dari Provinsi Kalimantan Tengah (dalam satuan Rupiah).

Variabel Dependen (Y)

Kesempatan Kerja (Y_1), kesempatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja pada berbagai sektor utama Provinsi Kalimantan Tengah yang dinyatakan dalam satuan orang. Tingkat serapan tenaga kerja dalam satu tahun tertentu (tahun t) diambil periode 2015-2017

Pertumbuhan Ekonomi (Y_2), pertumbuhan ekonomi adalah perubahan relatif nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Tengah atas dasar harga konstan tahun 2017

dan dinyatakan dalam satuan persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (tahun t) diambil periode 2015-2017 dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Sukirno, 2000):

$$G_t = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

G_t = tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t (%)

Y_{rt} = pendapatan (PDRB) riil pada tahun t (Rp)

Y_{rt-1} = pendapatan (PDRB) pada tahun sebelumnya (Rp)

Tingkat Kemiskinan (Y_3), yakni presentase penduduk yang berada di tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2017, data diambil dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerataan Pendapatan (Y_4), pemerataan pendapatan antara lapisan pendapatan masyarakat dengan mengamati perkembangan angka-angka rasio gini Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2017 (dalam satuan rasio). Data diambil dari BPS Provinsi Kalimantan Tengah.

3.5. Teknik dan Alat Analisis

Pengujian Statistik

Koefisien determinasi (R^2) memiliki tujuan untuk melihat kemampuan variabel indeviden dalam menjelaskan variabel dependennya pada sebuah model yang digunakan dalam penelitian. R^2 memiliki nilai yang berkisar antara 0 sampai 1.

Apabila nilai R^2 yang ditunjukkan pada model time series memiliki nilai mencapai angka 1 atau mendekati angka 1, maka dapat dijelaskan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya dengan baik. Sebaliknya apabila nilai R^2 yang ditunjukkan pada model time series memiliki nilai mencapai angka 0 atau mendekati angka 0, maka dapat dijelaskan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model penelitian kurang mampu atau tidak mampu menjelaskan variabel dependennya.

Koefisien regresi secara parsial (uji t), pengujian yang dilakukan terhadap koefisien dari variabel independen secara parsial. Fungsi dari uji t ialah untuk mengetahui tingkat signifikansi dari variabel independen secara individu dalam memengaruhi variabel dependen dalam sebuah model penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam uji t adalah:

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Apabila nilai *p-value* yang ditunjukkan oleh uji t memiliki nilai kurang dari *critical value*, maka hipotesis H_0 ditolak dan menerima Hipotesis H_1 . Sebaliknya apabila nilai *p-value* memiliki nilai lebih besar dari *critical value*, maka hipotesis H_0 diterima dan hipotesis H_1 ditolak.

Koefisien regresi secara simultan (uji F), pengujian terhadap koefisien dari variabel independen secara keseluruhan. Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah:

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1 = \text{paling tidak salah satu } \beta \text{ tidak sama dengan } 0$$

Apabila hasil penghitungan menunjukkan nilai probabilitas $F < F_{\text{tabel}}$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sebaliknya apabila hasil penghitungan menunjukkan nilai probabilitas $F > F_{\text{tabel}}$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak. Analisis Jalur (*Path Analysis*), tahapan penggunaan teknik analisis jalur dalam penelitian ini tidak terlepas dengan tahapan pengujian hipotesis. Karena analisis Jalur merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Adapun langkah-langkah analisis Jalur dalam penelitian ini adalah:

1) Merancang model analisis jalur

Jalur pengaruh langsung

- a. Dana desa (X) terhadap kesempatan kerja (Y_1)

$$Y_1 = \rho Y_1 X + \varepsilon$$

- b. Dana desa (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2)

$$Y_2 = \rho Y_2 X + \varepsilon$$

- c. Dana desa (X) terhadap tingkat kemiskinan (Y_3)

$$Y_3 = \rho Y_3 X + \varepsilon$$

- d. Kesempatan kerja (Y_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_2)

$$Y_2 = \rho Y_1 + \varepsilon$$

- e. Kesempatan kerja (Y_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y_3)

$$Y_3 = \rho Y_1 + \varepsilon$$

- f. Pertumbuhan ekonomi (Y_2) terhadap tingkat kemiskinan (Y_3)

$$Y_3 = \rho Y_2 + \varepsilon$$

- g. Kesempatan kerja (Y_1) terhadap pemerataan pendapatan (Y_4)

$$Y_4 = \rho Y_1 + \varepsilon$$

- h. Pertumbuhan ekonomi (Y_2) terhadap pemerataan pendapatan (Y_4)

$$Y_4 = \rho Y_2 + \varepsilon$$

- i. Tingkat kemiskinan (Y_3) terhadap pemerataan pendapatan (Y_4)

$$Y_4 = \rho Y_3 + \varepsilon$$

- j. Dana desa (X) terhadap pemerataan pendapatan (Y_4)

$$Y_4 = \rho X + \varepsilon$$

2) Membuat Pemerataan Struktural

- a. Persamaan sub struktural

$$1 : Y_1 = \rho Y_1 X + \varepsilon$$

- b. Persamaan sub struktural

$$2 : Y_1 = \rho Y_1 X + \varepsilon + \rho Y_2 X + \varepsilon$$

- c. Persamaan sub struktural

$$3 : Y_1 = \rho Y_1 X + \varepsilon + \rho Y_2 X + \varepsilon + \rho Y_3 X + \varepsilon$$

- d. Persamaan sub struktural

$$3 : Y_1 = \rho Y_1 X + \varepsilon + \rho Y_2 X + \varepsilon + \rho Y_3 X + \varepsilon + \rho Y_3 X + \varepsilon$$

Keterangan:

X : dana desa

Y_1 : kesempatan kerja

Y_2 : pertumbuhan ekonomi

Y_3 : tingkat kemiskinan

Y_4 : pemerataan pendapatan

ρ : koefisien jalur

ε : error term

4. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015, total alokasi dan realisasi penyaluran dana desa sebesar Rp. 403,35 miliar. Kemudian pada tahun 2016 penyaluran dana desa di Provinsi Kalimantan Tengah meningkat menjadi Rp. 1,148 triliun yang diperuntukkan bagi 1433 desa.

Kesempatan Kerja

Berdasarkan hasil penelusuran data penelitian, ditemukan data publikasi BPS yang membahas mengenai statistik perkembangan ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah periode 2015-2017. Dari temuan data tersebut diketahui bahwa jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2015 mencapai 1272 ribu jiwa bertambah sekitar 79.290 jiwa dibandingkan jumlah angkatan kerja pada tahun sebelumnya yang mencapai 1.193 ribu jiwa. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 39 ribu jiwa dari 1.272 ribu jiwa menjadi 1.311 ribu jiwa. Sedangkan jumlah angkatan kerja pada

tahun 2017 mencapai 1.276.669 jiwa, berkurang sekitar 34.758 jiwa dibandingkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2016 yang mencapai 1.311.427 orang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa program dana desa berpengaruh terhadap kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, pencegahan tingkat kemiskinan, dan pemerataan pendapatan.

Adapun saran penelitian ini sebagai berikut: (1) Sebagai Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah dalam proses pengelolaan dana desa seharusnya dapat melibatkan peran yang lebih aktif terhadap para aparatur pemerintah desa dan transparansi informasi yang disampaikan oleh pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Kalimantan Tengah; (2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten dan Aparatur pemerintah desa dan perlunya transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan dari Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alboronz, M,A., Becker, M., Cahyat, A., Croncleton, P., Jong, W. D., Evans,K., Wollenberg, E. 2007. *Menuju Kesejahteraan dalam Masyarakat Hutan: Buku Panduan untuk Pemerintah Daerah*. Bogor: Cifor.
- Ariffianto, W. Dan Setiyono, I. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*. Vol 1, No 3, (2013).
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keempat. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Azwardi dan Sukanto. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Juni 2014 Volume 12, No.1 hal: 29-41.
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data*. Third Edition. Great Britain: Anthony Rowe Ltd, Chippenam, Wiltshire.
- Barika. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi, terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi se Sumatera. *JEEP*. Vol. 5, NO. 1:27-36.
- Bempah, R. 2013. Analisis Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pendapatan Penduduk Miskin di Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. *E-jurnal katalogis*. Vol. 1 No.2, April 2013:55-66.
- Cahyanto, S. S. 2012. *Semangat Gotong Royong Dan Badan Usaha Milik Desa Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera. Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Kelembagaan Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia*. Yogyakarta: PSP UGM

- Case, K. E., & Fair, R. C. 2010. Prinsip-prinsip ekonomi, Ed. Ke-8, J.I.Jakarta: Penerbit Erlangga
- Duwi Priyanto, Paduan Praktis Olah Data menggunakan SPSS, Jogjakarta 2017: Penerbit CV. Andi Offset
- Fauzia, Ika Y. Dan Riyadi, Abdul K. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. Jakarta: Kencana Pramedia Group.
- Gonner, C., Cahyat, A., Haug, M., & GodwinLimberg. 2007. Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia Bogor: Cifor.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Harahap, W. Dan Bachtiar, N. 2017. Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Andalas.
- Harning, S. V & Amri, A. 2016. Dana Desa dan Kepadatan Belanja di Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*. Vol 1(1), 254-261.
- Haug, M. 2007. *Kemiskinan dan Desentralisasi di Kutai Barat: Dampak Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Dayak Benuaq*. Bogor: Cifor.